

Variabel-variabel yang memengaruhi status partisipasi Sekolah Menengah Atas sederajat penduduk usia 16-18 tahun tertua

Ahmad Bakri, Yaya Setiadi*

Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: setiadi@stis.ac.id

© Bakti & Setiadi, 2024

Abstract

In 2022, the province of West Kalimantan had an upper secondary school NER below the national average, ranking second to last among other provinces. Additionally, the NER varied significantly across its districts/cities. This indicates that upper secondary school participation in West Kalimantan Province remains relatively low and uneven. Despite the provincial government's adherence to the minimum budget allocation for education, these disparities persist. This study aimed to provide an overview of the situation, identify the variables influencing upper secondary school participation, and analyze the tendencies of these variables at both individual and district/city levels that significantly affect participation status. The analytical method used is multilevel binary logistic regression. The analysis reveals that receiving the PIP, the child's gender, the household head's education level, the child's age, the classification of residence, the percentage of non-personnel education expenditure in the regional budget, and the ratio of upper secondary schools to the population aged 16-18 years significantly influence upper secondary school participation status.

Keywords: Participation, Senior High School, Logistics, Multilevel

Abstrak

Pada Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Barat memiliki capaian APM SMA sederajat di bawah nasional dan menempati posisi kedua terakhir dari provinsi lainnya serta antar kabupaten/kota di dalamnya memiliki capaian yang bervariasi. Hal ini mengindikasikan partisipasi SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong rendah dan tidak merata. Padahal, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memenuhi alokasi minimum APBD untuk pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum, variabel-variabel yang memengaruhi, dan kecenderungan pengaruh dari variabel-variabel pada level individual dan kabupaten/kota yang signifikan memengaruhi status partisipasi SMA sederajat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner multilevel. Dari hasil analisis ditemukan bahwa variabel mendapatkan PIP, jenis kelamin anak, pendidikan KRT, usia anak, klasifikasi tempat tinggal, persentase APBD pendidikan belanja non pegawai dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun berpengaruh signifikan terhadap status partisipasi SMA sederajat.

Kata kunci: Partisipasi, Sekolah Menengah Atas, Logistik, Multilevel

How to Cite: Bakri, A., & Setiadi, Y. (2024). Variabel-variabel yang memengaruhi status partisipasi Sekolah Menengah Atas sederajat penduduk usia 16-18 tahun tertua. *Primatika: Jurnal Pendidikan Matematika*, 13(2), 125-140. <https://doi.org/10.30872/primatika.v13i2.4313>

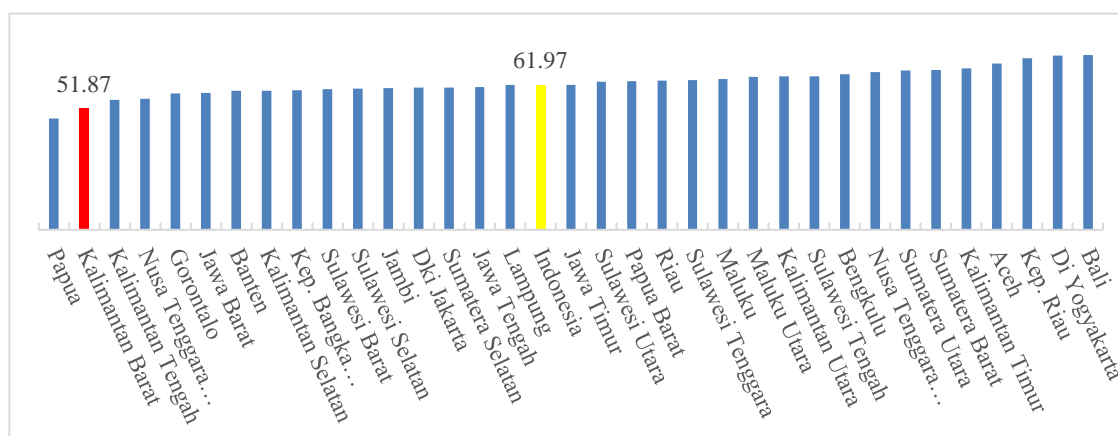
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi dasar bagi suatu negara. Pendidikan adalah sebuah investasi sumber daya manusia (SDM) serta alat untuk melawan kebodohan dan kemiskinan (Karini, 2018). Pendidikan memiliki peranan yang besar bagi pembangunan suatu negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai penyiapan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu hak dan kewajiban (Amaliah, 2015). Pendidikan juga disinggung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional yang menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan berkualitas menjadi tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan berkualitas juga merupakan salah satu dari lima sasaran dalam kerangka SDGs yang fokus pada pilar pembangunan sosial untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas tersedia untuk semua orang tanpa terkecuali serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu faktor utama dalam pembangunan harus adanya SDM yang bermutu (Suwartini, 2017). Untuk mendapatkan SDM yang bermutu maka diperlukan pendidikan yang berkualitas. Salah satu cara peningkatan pendidikan guna mendorong perkembangan suatu negara adalah dengan meningkatkan partisipasi pendidikannya. Hal ini yang akan memengaruhi capaian pendidikan di suatu negara (Utami & Wicaksono, 2019). Kondisi partisipasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Partisipasi pendidikan dikelompokkan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Usia pendidikan terbagi menjadi 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-23 tahun dengan tingkat pendidikan yang terbagi menjadi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sederajat, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) sederajat dan Perguruan Tinggi (PT) sederajat.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, APM adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila

dibandingkan dengan APK, APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2021). Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (16-18 tahun untuk SMA/SMK/MA sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.

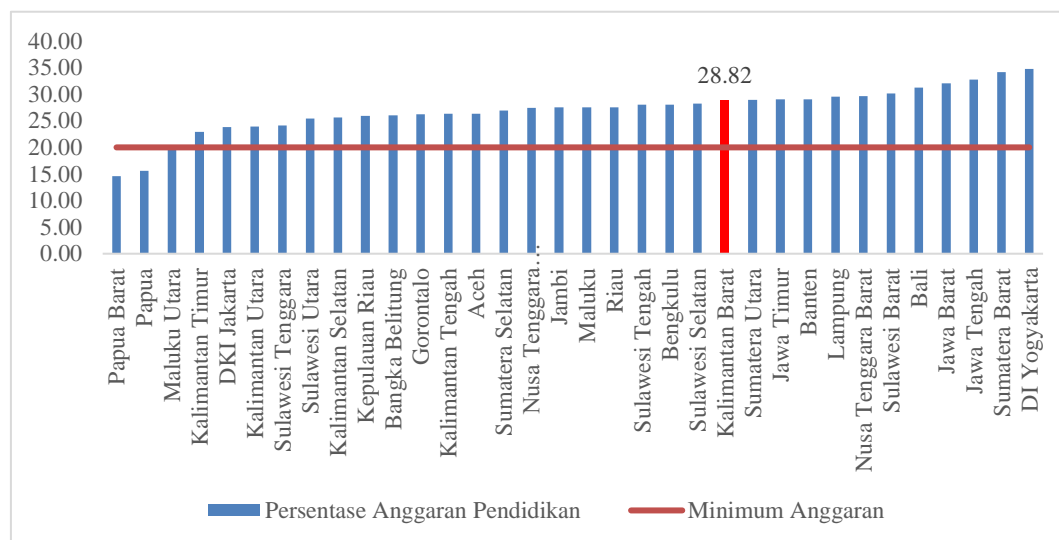


Gambar 1. APM SMA sederajat berdasarkan provinsi di Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat kedua terakhir untuk APM SMA sederajat di Indonesia dan peringkat terakhir di Pulau Kalimantan sebesar 51,87. Angka tersebut masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 61,97 yang artinya provinsi tersebut masih minim akan partisipasi anak sekolah pada usia 16-18 tahun untuk menempuh jenjang SMA sederajat. Salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat di Indonesia adalah anggaran pendidikan (Mukhaiyar dkk., 2022). Pemerintah setiap tahunnya selalu menyiapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 49 ayat 1. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah sudah berkomitmen untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui anggaran yang diberikan. Alokasi APBD sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu secara ekonomi, sehingga anak-anak dari kaum miskin pun mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak kaum kaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarganya melalui pendidikan yang berkelanjutan (Simanjuntak, 2017).

Berdasarkan Gambar 2 yang bersumber dari Kementerian Keuangan pada bulan Mei Tahun 2022, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menaati UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Hal ini bertolak belakang apabila dilihat dari sisi partisipasi SMA sederajat yang diambil dari data APM. Provinsi Kalimantan Barat menempati peringkat terakhir dengan APM terendah di Pulau Kalimantan hanya mencapai 51,87, angka tersebut masih di bawah angka nasional yaitu sebesar 61,97. Dengan anggaran yang sudah melebihi 20 persen dan lebih besar dari 14 provinsi

lainnya terutama yang ada di Pulau Kalimantan, seharusnya kualitas pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan partisipasi SMA sederajat Provinsi Kalimantan Barat yang lebih tinggi, terutama di Pulau Kalimantan.



Gambar 2. Persentase APBD untuk pendidikan berdasarkan provinsi Tahun 2022

Beberapa penelitian terkait partisipasi pendidikan SMA sederajat telah dilakukan sebelumnya. Sebagian besar penelitian masih menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi partisipasi SMA sederajat hanya pada satu level saja, yaitu level mikro saja ataupun makro saja (Nau Dewa & Prasetyo, 2022; Arunatilake, 2006; Virdam & Nani Ariani, 2023; Aurellin & Sentosa, 2023). Padahal, kedua level tersebut dapat secara bersama memengaruhi partisipasi sekolah (Muttaqin, 2020). Sehingga, jika variabel pada level makro dilibatkan dalam analisis bersama dengan variabel pada level mikro maka analisis multilevel lebih tepat untuk digunakan. Masih banyak penelitian yang belum melibatkan faktor APBD pendidikan belanja non pegawai di level makro. Padahal menurut Nurkolis (2012) pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, kebanyakan anggaran pendidikan terserap untuk gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Begitu kecilnya anggaran untuk belanja modal dan barang dan jasa dikhawatirkan mengancam kualitas pembelajaran di kelas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran umum, variabel-variabel yang memengaruhi, dan kecenderungan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun tertua di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022.

Metode Penelitian

Data yang digunakan untuk analisis penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Modul KOR Susenas Maret 2022, publikasi BPS, situs web Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. penduduk usia 16-18 tahun tertua di setiap rumah tangga dan belum pernah tamat SMA sederajat yang bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat

dengan jumlah 1.342 penduduk. Menurut Hurlock dalam Rini (2012), biasanya anak tertua dalam sebuah keluarga diharapkan menjadi teladan bagi adik-adiknya. Hal ini berarti bahwa ketika pendidikan anak tertua sudah baik, harapannya adalah bahwa pendidikan anak-anak berikutnya juga akan menjadi baik. Variabel respons yang digunakan adalah status partisipasi SMA sederajat yang terdiri dua kategori (biner) yaitu "Berpartisipasi SMA Sederajat" dan "Tidak Berpartisipasi SMA Sederajat". Kategori "Berpartisipasi SMA Sederajat" menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 16-18 tahun masih/sedang berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat, sedangkan kategori "Tidak Berpartisipasi SMA Sederajat" menunjukkan bahwa penduduk tersebut tidak/belum berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat.

Menurut *human capital theory* atau teori modal manusia, di negara berkembang keputusan keikutsertaan anak dalam pendidikan ditentukan oleh orang tua (Becker, 2009). Muttaqin (2020) melakukan penelitian tentang anak-anak yang berpartisipasi di sekolah. Penelitian tersebut menggunakan teori struktur peluang yang mengacu pada gagasan bahwa peluang adalah kesempatan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pekerjaan dan pendidikan yang dipengaruhi oleh organisasi atau struktur masyarakat atau lembaga tertentu. Roberts (2009) mengklasifikasikan struktur peluang menjadi dua dimensi. Faktor pendorong utamanya berasal dari status yang diberikan, seperti latar belakang keluarga dan jenis kelamin, sementara faktor penarik berasal dari pemerintah, sebagai penyedia layanan pendidikan. Woldehanna dkk. (2006) mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah yaitu individu, rumah tangga, sekolah, pemerintah dan lingkungan.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu metode analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang digunakan. Variabel tersebut adalah variabel penjelas dan variabel respons. Media yang digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel tersebut adalah tabel. Analisis inferensia yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh dan kecenderungan mendapatkan PIP, jenis kelamin anak, pendidikan KRT, usia anak, klasifikasi tempat tinggal, persentase APBD pendidikan belanja non pegawai dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap status partisipasi SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022. Analisis inferensia yang digunakan adalah regresi logistik biner multilevel.

Dalam analisis regresi logistik biner multilevel terdapat dua model, yaitu model *random slope* dan model *random intercept*. Model *random slope* memiliki nilai *slope* yang berbeda setiap unit/grup sampel sedangkan model *random intercept* memiliki nilai *intercept* yang berbeda di setiap unit/grup sampel namun nilai dari *slope* selalu sama di setiap unit/grup sampel (Harlan, 2016). Menurut Hox (2010), model dengan *random intercept* dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan model yang menggunakan *random slope*. Dalam penelitian ini menggunakan model *random intercept* sehingga pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respons di setiap kabupaten/kota diasumsikan sama. Persamaan (1) adalah persamaan regresi logistik biner dua level dengan *random intercept* dalam penelitian ini.

$$\ln\left(\frac{\hat{\pi}_{ij}}{1 - \hat{\pi}_{ij}}\right) = \hat{\gamma}_{00} + \hat{\gamma}_{10}PIP_{ij} + \hat{\gamma}_{20}JK_{ij} + \hat{\gamma}_{30}Pend_{ij} + \hat{\gamma}_{40}Usia16_{ij} + \hat{\gamma}_{50}Usia17_{ij} + \hat{\gamma}_{60}KTT_{ij} + \hat{\gamma}_{01}APBD_Pend_j + \hat{\gamma}_{02}RSMA_j + \hat{u}_{0j} \quad (1)$$

dengan:

- i = urutan sampel level individu (level 1), $i = 1, 2, \dots, n_j$; n_j merupakan jumlah penduduk pada level 1 dalam kelompok j
- j = urutan sampel level kabupaten/kota (level 2), $j = 1, 2, \dots, 14$
- \hat{u}_{0j} = penduga residual efek acak pada level 2 untuk kabupaten/kota ke j
- $\hat{\pi}_{ij}$ = peluang kejadian sukses pada individu ke- i dalam kelompok ke- j
- $\hat{\gamma}_{00}$ = Intersep
- $\hat{\gamma}_{p0}$ = efek tetap (*fixed slope*) untuk variabel penjelas ke p
- $\hat{\gamma}_{0q}$ = efek tetap (*fixed slope*) untuk variabel penjelas ke q
- p = 1, 2, 3, 4, 5, 6
- q = 1, 2

Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter dalam model ini adalah *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). MLE bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi *likelihood* sehingga estimator yang dihasilkan akan mendekati data observasi secara maksimal (Hosmer dkk., 2013). Solusi dari persamaan *likelihood* diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak Rstudio yang menggunakan metode iteratif. Analisis regresi logistik biner multilevel dengan *random intercept* dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengujian signifikansi *random effect* digunakan untuk menentukan apakah terdapat efek acak dengan membandingkan model yang memasukkan efek acak dengan model yang tidak memasukkan efek acak. *random effect* signifikan mengindikasikan terdapat variasi antar kelompok pada variabel respons, sehingga lebih disarankan menggunakan model multilevel daripada model satu level.
2. *Intraclass Correlation Coefficient* atau ICC adalah proporsi dari variasi yang dijelaskan oleh pola pengelompokan dalam populasi. ICC mencerminkan sejauh mana dua unit observasi yang dipilih secara acak dari kelompok yang sama untuk berkorelasi (Hox, 2010). ICC digunakan untuk mendapatkan ukuran varians dari partisipasi sekolah menengah atas sederajat penduduk usia 16-18 tahun yang muncul karena variasi karakteristik antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Nilai ICC dihitung sebagai berikut :

$$\rho = \frac{\sigma_{u0}^2}{\sigma_{u0}^2 + 3,29} \quad (2)$$

3. Pengujian dilakukan secara simultan untuk menentukan setidaknya satu variabel penjelas yang mempengaruhi status partisipasi sekolah menengah atas sederajat penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Penolakan H_0 mengindikasikan bahwa setidaknya satu variabel penjelas memiliki dampak yang signifikan pada variabel respons. Pengujian secara parsial bertujuan untuk menguji pengaruh dari setiap variabel penjelas terhadap status partisipasi sekolah menengah atas sederajat penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Penolakan H_0 ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial dari

variabel penjelas terhadap variabel respons. *Odds ratio* digunakan untuk menilai kecenderungan setiap kategori variabel penjelas dalam mempengaruhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan, persentase penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat yang berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat mencapai 63,72 persen. Persentase partisipasi tertinggi ditemukan di Kota Pontianak hingga mencapai 81,5 persen dan sebaliknya persentase terendah ditemukan di Kabupaten Sanggau yang hanya mencapai 49,3 persen. Terlihat pada Tabel 1, persentase penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat tersebut ditemukan lebih tinggi pada penduduk yang mendapatkan PIP sebesar 72,7 persen, berjenis kelamin perempuan sebesar 64,8 persen, dengan pendidikan KRT minimal SMA sebesar 80,1 persen, berusia 17 tahun sebesar 72,3 persen dan bertempat tinggal di wilayah perkotaan sebesar 73,8 persen.

Tabel 1. Persentase Status Partisipasi SMA Sederajat Setiap Variabel Penjelas Level Individual

No.	Variabel	Kategori	Status Partisipasi SMA Sederajat	
			Ya	Tidak
1	Mendapatkan PIP	Tidak	63	37
		Ya	72,7	27,3
2	Jenis Kelamin Anak	Perempuan	64,8	35,2
		Laki-laki	62,7	37,3
3	Pendidikan KRT	<SMA	58,1	41,9
		>=SMA	80,1	19,9
4	Usia Anak	16 Tahun	71,1	28,9
		17 Tahun	72,3	27,7
		18 Tahun	40,2	59,8
5	Klasifikasi Tempat Tinggal	Perdesaan	58,5	41,5
		Perkotaan	73,8	26,2

Sumber : Susenas Kor Maret 2022, diolah

Tabel 2. Ringkasan Statistik Variabel Penjelas Level Kabupaten/Kota

Variabel	Ringkasan Statistik		Hubungan Dengan Variabel Respons
	Minimum	Maksimum	
Persentase APBD Pendidikan Belanja Non Pegawai	19,11 (Melawi)	46,45 (Kota Pontianak)	Positif/Searah
Rasio Jumlah SMA Sederajat Terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun	26,96 (Sambas)	71,52 (Kubu Raya)	Positif/Searah

Sumber : Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2, variabel persentase APBD pendidikan belanja non pegawai ditemukan bahwa Kota Pontianak menempati posisi pertama sebagai kabupaten/kota dengan persentase APBD pendidikan belanja non pegawai terbesar di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, yaitu sebanyak 46,45 persen. Sementara itu, Kabupaten Melawi merupakan kabupaten/kota yang memiliki persentase APBD pendidikan

belanja non pegawai yang terkecil di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 19,11 persen. Hal tersebut menandakan bahwa lebih dari 50 persen anggaran pendidikan digunakan hanya untuk belanja pegawai. Kemudian berdasarkan variabel rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun ditemukan bahwa Kabupaten Kubu Raya menempati posisi pertama sebagai kabupaten/kota dengan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, yaitu sebesar 71,52 yang artinya setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun terdapat 71-72 SMA sederajat. Sementara itu, Kabupaten Sambas merupakan kabupaten/kota yang memiliki rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun yang terkecil di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 26,96.

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh, maka dilakukan analisis inferensia dengan regresi logistik biner multilevel. Pertama, dari pengujian signifikansi efek acak diperoleh nilai statistik uji *Likelihood Ratio* (LR) yaitu 16,319 dan *p-value* yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 0,1$ sehingga dengan tingkat signifikansi sepuluh persen dapat disimpulkan bahwa regresi logistik biner multilevel lebih cocok dibandingkan dengan model regresi logistik biner satu level. Kedua, nilai ICC yang dihasilkan pada kondisi *null model* yaitu sebesar 0,038 yang berarti bahwa proporsi variasi status partisipasi pendidikan SMA sederajat pada level kabupaten/kota terhadap variasi totalnya adalah sebesar 3,8 persen. Ketiga, dari hasil uji simultan diperoleh statistik uji G sebesar 140,59 dan *p-value* yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 0,1$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu variabel penjelas di dalam model yang memengaruhi status partisipasi pendidikan SMA sederajat di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, maka dapat dibentuk persamaan sebagai berikut

$$\ln\left(\frac{\hat{\pi}_{ij}}{1 - \hat{\pi}_{ij}}\right) = -1,996091^* + 0,414596PIP^*_{ij} - 0,293007JK^*_{ij} + 0,906344Pend^*_{ij} \\ + 1,194300Usia16^*_{ij} + 1,209144Usia17^*_{ij} + 0,362294KTT^*_{ij} \\ + 0,030158APBD_Pend^*_j + 0,011665RSMA^*_j + \hat{u}_{0j}$$

Selanjutnya hasil pengujian signifikansi parameter secara parsial dan *odds ratio* dapat dilihat pada Tabel 3. Diketahui bahwa pada tingkat signifikansi sepuluh persen, semua variabel penjelas berpengaruh signifikan terhadap status partisipasi SMA sederajat. diketahui bahwa variabel mendapatkan PIP memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,414596. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan PIP mempunyai kecenderungan 1,5137588 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun yang tidak mendapatkan PIP dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nau Dewa & Prasetyo (2022) yang menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang tidak memiliki KIP/PIP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan penduduk usia 16-18 tahun yang memiliki KIP/PIP, dengan

asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020) juga menunjukkan hasil yang sama di mana variabel status kepemilikan KIP/PIP berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020) menunjukkan bahwa anak yang memiliki KIP/PIP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi sekolah dibandingkan yang tidak memiliki KIP/PIP. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah di bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Bantuan berupa KIP/PIP dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan yang lebih baik, agar program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai.

Tabel 3. Hasil Pengujian Signifikansi Parameter Secara Parsial Dan *Odds Ratio* Pada Setiap Variabel Penjelas

No.	Variabel	$\hat{\gamma}$	<i>Odds Ratio</i>	<i>P value</i>
	Konstanta	-1,996091	0,1358654	0,00022*
Variabel Penjelas Level Individual				
1	Mendapatkan PIP (ref : Tidak Mendapatkan PIP)			
	Mendapatkan PIP	0,414596	1,5137588	0,07912*
2	Jenis Kelamin Anak (ref : Perempuan)			
	Laki-laki	-0,293007	0,7460171	0,01535*
3	Pendidikan KRT (ref : <SMA)			
	>=SMA	0,906344	2,4752568	0,00000*
4	Usia Anak (ref : 18 Tahun)			
	16 Tahun	1,194300	3,3012472	0,00000*
	17 Tahun	1,209144	3,3506155	0,00000*
5	Klasifikasi Tempat Tinggal (ref : Perdesaan)			
	Perkotaan	0,362294	1,4366219	0,01979*
Variabel Penjelas Level Kabupaten/Kota				
6	Persentase APBD Pendidikan Belanja Non Pegawai	0,030158	1,0306170	0,00454*
7	Rasio Jumlah SMA Sederajat Terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun	0,011665	1,0117337	0,07080*

Keterangan : * signifikan pada $\alpha = 10$ persen.

Selanjutnya variabel jenis kelamin anak memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar -0,293007. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kecenderungan 0,7460171 kali lebih kecil untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun yang berjenis kelamin perempuan dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan literatur terdahulu yang menyatakan partisipasi sekolah anak perempuan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki (Pangesti Arum & Roza Adry, 2020). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa anak perempuan cenderung lebih siap untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan anak perempuan, secara konsisten

menunjukkan perilaku yang lebih mudah diatur, kemampuan bahasa, dan kompetensi sosial relatif lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki (Bulotsky-Shearer dkk., 2012). Studi yang ada menyatakan orang tua lebih mungkin untuk menyekolahkan anak perempuan dari anak laki-laki (Banzragch dkk., 2019). Selanjutnya, Arunatilake (2006) memperkirakan bahwa anak laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk berada di sekolah dasar, mungkin karena keterlambatan mulai sekolah oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Disisi lain, menurut Rafique dkk. (2020) kemiskinan adalah penyebab nyata rendahnya partisipasi sekolah yang menyebabkan anak laki-laki harus bekerja demi membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan penduduk berumur 15-19 tahun yang bekerja selama seminggu yang lalu hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selanjutnya variabel pendidikan KRT memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,906344. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang mempunyai KRT dengan pendidikan minimal SMA sederajat mempunyai kecenderungan 2,4752568 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun yang mempunyai KRT dengan pendidikan minimal SMP sederajat dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nau Dewa & Prasetyo (2022) yang menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun dengan pendidikan KRT maksimal tamat SMP memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan penduduk usia 16-18 tahun dengan KRT berpendidikan minimal tamat SMA ke atas, dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hasil penelitian Khairunnisa dkk. (2014) juga menyebutkan semakin tinggi tingkat pendidikan KRT yang berpendidikan di atas SMP semakin besar kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin besar jumlah KRT yang berpendidikan di atas SMP semakin banyak anak yang bersekolah karena orang tua mereka menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan lebih tinggi dari orang tuanya. Todaro dan Smith dalam Khairunnisa dkk. (2014) mengatakan bahwa salah satu faktor sosial ekonomi terpenting adalah pendidikan KRT. Semakin tinggi pendidikan KRT semakin tinggi kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya.

Selanjutnya variabel usia anak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 1,194300 untuk usia 16 tahun dan 1,209144 untuk usia 17 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16 tahun mempunyai kecenderungan 3,3012472 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 18 tahun dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Begitu juga dengan penduduk usia 17 tahun mempunyai kecenderungan 3,3506155 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 18 tahun dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Dengan kata lain, semakin bertambahnya usia, maka

kecenderungan untuk berpartisipasi SMA sederajat semakin kecil. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Arunatilake (2006) yang menunjukkan bahwa partisipasi anak di sekolah cenderung menurun seiring bertambahnya usia mereka, yang mana hal tersebut menunjukkan pengaruh negatif usia terhadap keterlibatan anak dalam dunia pendidikan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Huisman & Smits (2009) di mana usia anak ternyata memiliki dampak negatif terhadap keterlibatan mereka dalam dunia pendidikan di 30 negara berkembang yang menjadi fokus penelitian. Korelasi negatif antara usia dan partisipasi sekolah terkait dengan pilihan seseorang untuk bekerja demi membantu keluarga atau memilih menikah, terutama pada perempuan. Emerson & Souza (2008) mengungkapkan bahwa di negara berkembang, anak-anak yang lebih tua memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk berpartisipasi dalam sekolah. Alasannya adalah karena mereka harus membantu orang tua mereka bekerja dan menyekolahkan adik-adik mereka, sehingga waktu untuk sekolah menjadi terbatas. Hal tersebut sejalan dengan hasil Sakernas Agustus penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, semakin bertambah umur penduduk maka jumlah penduduk yang bekerja semakin banyak (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selanjutnya variabel klasifikasi tempat tinggal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,362294. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan mempunyai kecenderungan 1,4366219 kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan SMA sederajat dibandingkan penduduk usia 16-18 tahun yang bertempat tinggal di perdesaan dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nau Dewa & Prasetyo (2022) yang menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah perdesaan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk tidak berpartisipasi sekolah dibandingkan dengan penduduk usia 16-18 tahun yang tinggal di daerah perkotaan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiadi dkk. (2017) dan Hakim (2020) yang menunjukkan daerah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Responden yang tinggal di daerah perkotaan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bersekolah dibandingkan responden yang tinggal di daerah perdesaan. Menurut Khusaini & Muvera (2020) sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan sekolah di perdesaan. Fasilitas ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Hal tersebut juga bisa dilihat dari angka melek huruf penduduk usia 15-19 tahun Provinsi Kalimantan Barat untuk wilayah perkotaan yang sudah mencapai 100 persen, sedangkan perdesaan belum menyentuh angka 100 persen. Menurut Does dkk. (2015) angka melek huruf dapat menjadi indikator untuk melihat perkembangan pendidikan penduduk.

Dari segi kontekstual variabel persentase APBD pendidikan belanja non pegawai memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,030158. Hal ini

berarti bahwa setiap penambahan persentase APBD pendidikan belanja non pegawai sebesar satu persen, maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk berpartisipasi SMA sederajat sebesar 1,0306170 kali dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aurellin & Sentosa (2023) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap APM SMA provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya ketika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat maka APM provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat. Alokasi APBD sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu secara ekonomi, sehingga anak-anak dari kaum miskin pun mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak kaum kaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi keluarganya melalui pendidikan yang berkelanjutan (Simanjuntak, 2017).

Selanjutnya variabel rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap status partisipasi SMA sederajat penduduk usia 16-18 tahun dengan nilai koefisien sebesar 0,011665. Hal ini berarti bahwa setiap penambahan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk berpartisipasi SMA sederajat sebesar 1,0117337 kali dengan asumsi variabel penjelas lainnya dianggap sama atau konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian Virdam & Nani Ariani (2023) yang menunjukkan bahwa jumlah sekolah memiliki pengaruh positif terhadap APS tingkat Provinsi dalam Pulau Sulawesi periode 2014-2021. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Johri yang mengatakan bahwa tujuan peningkatan partisipasi sekolah khususnya untuk masyarakat tidak mampu dapat didukung dengan peningkatan sarana prasarana. Gedung sekolah mempunyai fungsi sebagai tempat berinteraksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sumarno (2019) yang menyatakan bahwa jumlah sekolah berpengaruh positif terhadap APS. Persebaran jumlah sekolah yang merata membuat masyarakat mudah dalam mengakses fasilitas pendidikan. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan dan akan berdampak pada peningkatan APS.

KESIMPULAN

Persentase penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat lebih dominan berpartisipasi SMA sederajat. Kelompok penduduk tersebut memiliki karakteristik yang mendapatkan PIP, berjenis kelamin perempuan, memiliki KRT dengan pendidikan minimal SMA sederajat, berusia 17 tahun, bertempat tinggal di perkotaan, serta tinggal di kabupaten/kota dengan persentase APBD pendidikan non pegawai yang tinggi dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun yang tinggi.

Variabel-variabel yang memengaruhi status partisipasi SMA sederajat pada level individual adalah mendapatkan PIP, jenis kelamin anak, pendidikan KRT, usia anak,

dan klasifikasi tempat tinggal. Sementara itu, variabel yang memengaruhi status partisipasi SMA sederajat pada level kabupaten/kota adalah persentase APBD pendidikan non pegawai dan rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun.

Pada level individual, peluang penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kalimantan Barat untuk berpartisipasi SMA sederajat menjadi lebih besar pada penduduk yang mendapatkan PIP, berjenis kelamin perempuan, memiliki KRT dengan pendidikan minimal SMA sederajat, berusia 16-17 tahun dan bertempat tinggal di perkotaan. Pada level kabupaten/kota peluang partisipasi SMA sederajat juga ditemukan semakin besar seiring semakin besarnya persentase APBD pendidikan belanja non pegawai dan semakin besarnya rasio jumlah SMA sederajat terhadap penduduk usia 16-18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, D. (2015). Pengaruh Partisipasi Pendidikan Terhadap Persentase Penduduk Miskin. *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(3), 231–239.
- Arunatilake, N. (2006). Education participation in Sri Lanka-Why all are not in school. *International Journal of Educational Research*, 45(3), 137–152. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.11.001>
- Aurellin, D., & Sentosa, S. U. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 89. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14863>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023*.
- Banzragch, O., Mizunoya, S., & Bayarjargal, M. (2019). Education inequality in Mongolia: Measurement and causes. *International Journal of Educational Development*, 68(July 2018), 68–79. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.04.010>
- Becker, G. S. (2009). *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.
- Bulotsky-Shearer, R. J., Dominguez, X., & Bell, E. R. (2012). Preschool Classroom Behavioral Context and School Readiness Outcomes for Low-Income Children: A Multilevel Examination of Child- and Classroom-Level Influences. *Journal of Educational Psychology*, 104(2), 421–438. <https://doi.org/10.1037/a0026301>
- Dores, E., Rosa, Y. Del, & Jolianis. (2015). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. *Pendidikan Ekonomi*, 2(2).
- Emerson, P. M., & Souza, A. P. (2008). Birth Order, Child Labor, and School Attendance in Brazil. *World Development*, 36(9), 1647–1664. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.09.004>
- Hakim, A. (2020). Faktor penyebab anak putus sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122–132.
- Harlan, J. (2016). *Analisis Multilevel*. Gunadarma.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (3rd ed., Vol. 47, Issue 4). Jhon Wiley & Sons. <https://doi.org/10.2307/2532419>
- Hox, J. J. (2010). *Multilevel Analysis* (2nd ed., Vol. 2). Routledge.
- Huisman, J., & Smits, J. (2009). Effects of Household- and District-Level Factors on Primary School Enrollment in 30 Developing Countries. *World Development*, 37(1), 179–193. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.01.007>

- Karini, P. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16–18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2022.106953>
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.444>
- Khusaini, & Muvera. (2020). Prestasi Belajar dan Karakteristik Orang Tua: Studi Perbandingan Sekolah Menengah Atas Perkotaan-Pedesaan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 296–310. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/28343>
- Mukhaiyar, U., Rontos, F., Handoko, K., & Kardiyan, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat di Indonesia Menggunakan Regresi Ridge. *Euler: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi*, 10(2), 222–234. <https://doi.org/10.34312/euler.v10i2.15903>
- Muttaqin, T. (2020). *Four essays on determinants of unequal access to and quality of education*. University of Groningen.
- Nau Dewa, Y. Y., & Prasetyo, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun (SMASederajat) Di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 175–184. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1250>
- Nurkolis. (2012). Belanja Pendidikan Tersedot Untuk Gaji Pegawai. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.26877/jmp.v1i1.210>
- Pangesti Arum, A., & Roza Adry, M. (2020). Analisis Determinan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jambi. 9, 10–21. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2021). *RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat* (Issue 0561).
- Rafique, D., Shaukat, S., Rasul, S., Ahmed, Z., Shahzad, I., & Ali Bhatti, M. (2020). Socio-economic Determinants of School Attendance of Punjab, Pakistan. *Economics*, 9(1), 8–16. <https://doi.org/10.11648/j.eco.20200901.12>
- Rini, A. R. P. (2012). Kemandirian Remaja Berdasarkan Urutan Kelahiran. *Jurnal Pelopor Pendidikan*, 3(1), 61–70. <http://www.stkipprismmp.ac.id/jurnal-pelopor-pendidikan-2/>
- Roberts, K. (2009). Opportunity structures then and now. *Journal of Education and Work*, 22(5), 355–368. <https://doi.org/10.1080/13639080903453987>
- Setiadi, Y., Kurniawan, R., & Diantoro, G. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaktuntasan Belajar 12 Tahun Pada Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Hasil Susenas Tahun 2011 Provinsi Papua Barat.
- Simanjuntak, F. N. (2017). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *JDP*, 10, 169–195.
- Sumarno, S. (2019). Angka Partisipasi Sekolah Kasar SMA Rendah Dampak Dari Tingkat Kemiskinan dan Upaya Mengatasinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 28–36. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1501>
- Suwartini, S. (2017). Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan. *Trihayu : Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(1), 220–234.
- Utami, E. D., & Wicaksono, F. (2019). Determinan partisipasi sekolah di Indonesia: analisis data Susenas tahun 2017. *Jurnal Ilmiah WIDYA Non-Eksakta*, 1(1), 68–73.

-
- Virdam, F., & Nani Ariani, M. B. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah pada Provinsi di Pulau Sulawesi. *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 2(1), 20–35.
- Woldehanna, T., Jones, N., & Tefera, B. (2006). *Children's Educational Completion Rates and Achievement : Implication Ethiopia's Second Poverty Reduction Strategy*. Young Lives.

